

1. mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan formal---  
2. mendirikan madrasah dari tingkat usia dini sampai dengan  
pendidikan tinggi;-----  
3. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal,  
seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan;-----  
4. Mengelola panti asuhan untuk fakir miskin dan yatim piatu  
serta rumah jompo;-----  
5. Memberikan santunan atau bea siswa kepada anak yatim dan  
duafe;-----  
6. Mendirikan dan menyukseskan kegiatan masjid, majelis ta'lim,  
pesantren dan kegiatan ibadah ummat Islam lainnya;-----  
7. Pekerjaan dengan Pemerintah atau Swasta, baik di dalam  
maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan----  
yang sama dengan maksud dan tujuan Yayasan ini dengan----  
mengindahkan tatasusila serta tidak bertentangan dengan  
peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

JANGKA WAKTU

----- Pasal 4. -----

-----Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak  
ditentukan.-----

----- K E K A X R A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari  
kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi  
sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----  
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat;--



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/284 - Dikdas  
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

#### PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SALUYU" DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- mbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, penibinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut. Perlu mencapai keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- jngat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159 )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168).
- perhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SALUYU" sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
  - c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
  - d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Cibinong  
: 17 April 2007

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor**



Drs. H.M. Endang Basuni, SH, MM  
NIP. 010 069 482

**Tembusuj :**

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Ytn. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor  
Nomor : 492/Q.Sy. - Diklus  
Tanggal : 17 April 2007.

---

### SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM "SALUYU"

Nama PKBM : "SALUYU"  
Ketua Penyelenggara : M. Tauhid ✓  
Penanggung Jawab : 1. Cicitat Jonggol  
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Jonggol  
Pembina Teknis : Penilik PLS  
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional  
2. Kejar Paket A Setara SD  
3. Kejar Paket d Setara SMP  
4. Kejar Paket C Setara SMA  
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
6. Program Beasiswa Magung  
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)  
8. Program PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini )  
Alamat : Jl. Pojok Salak Rt. 03 Rw. 08 Desa Jonggol  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.



NPS.H.M. Endang Basuni, SH, MM  
NIP. 010 069 482



**SURAT KEPUTUSAN**

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUKMANUL HAKIM**

**NO.005/YPPM/H/IV/2005**

**Tentang**

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**SALUYU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan dibidang Pendidikan khusus pendidikan Non Formal, maka perlu untuk didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka membantu Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di masyarakat.
- b. Bahwa sehubungan dengan ini perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Imbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945Aalinea ke 4 tentang mencerdaskan kehidupan Bangsa.
3. Undang-Undang no.22 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Lukmanul Hakim Pasal 5 ayat 8 tentang Usaha-Usaha Yayasan bekerjasama dengan badan-badan Hukum Sosial maupun badan-badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim tanggal, 07 Maret 2005, Perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Salcyu, Yang berkedudukan di Kp. Nyalindung RT. 03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Kedua : Disahkaninya Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Yang berkedudukan di Kp. Nyalindung RT. 03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tersebut memperoleh status hukum yang sah dan resmi .

- Ketiga : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkedudukan di Kp. Nyalindung RT.03/05 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dicantum dalam Buku Daftar Agenda Surat Keluar Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui Bersama.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal surat tersebut.

Ditetapkan : Di Jonggol  
Pada Tanggal : 23 April 2005

Pengurus Yayasan  
Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim



DR. ABDUL KARIM HALIM, MS.I.  
Ketua

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Badan Pembina Yayasan Pendidikan Pengembangan Lukmanul Hakim
2. Badan pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lukmanul hakim
3. Pengurus Yayasan pendidikan dan Pengembangan Lukmanul Hakim
4. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022091.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris BUDY BHUDIMAN, SH , sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BUDY BHUDIMAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum: Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM tanggal 19 April 2016 dengan Nomor Pendafutan 501404190210297 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yavacan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan keabsahan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum: Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU :  
: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BUDY BHUDIMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Dilemparkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI JEFERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

UF. FREDDY HARTAS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022091.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUKMANUL HAKIM

1. Kekayaan awal: Rp. 75.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. ABDULKARIM HALIM MSI	321106060750002
NANANG RAHMAT, ST	3201161103740001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	ORGAN	JABATAN
DR. ABDULKARIM HALIM MSI	321106060750002 PEMBINA	KETUA
DR. ARES SUSILO MARS	320116120275009 PEMBINA	ANGGOTA
DRS DIDI SUDIRMAN	321607016168008 PENGURUS	KETUA
SURYANA,S.E	320106090670009 PENGURUS	SEKRETARIS
NENENG NURHAYATI SSI	327506630233004 PENGURUS	BENDAHARA
SUKARTONO	320107200463007 PENGAWAS	KETUA
NANANG RAHMAT, ST	3201161103740001 PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DH. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023058.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016



**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman : 1

<p>a) HAK NILIK , No. 62 . Desa Sukmajaya ;</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK <u>SIRENGA BIN MAJANI</u></p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>											
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konvensi dari milik adat Letter.C.No.1074. Persil.No.124.D.III . 2. Pemberian hak</p>											
<p>d) PEMBUKUAN 3. Pemisahan . 4. Penggabungan</p>											
<p>e) SURAT KEPUTUSAN</p>											
<p><b>Drs. IMRONI ANWAR S.S.</b> NIP. 010033945</p>											
<p>Ganti rugi/uang wajib Lemanya hak berikut Berkahimya hak Tgl.</p>											
<p><b>Drs. H. DR. SOENARKO, M.P.</b> NIP. 010333945</p>											
<p><b>D. SERTIPIKAT</b> BOGOR, Tgl. 16 September 1986.</p>											
<p>A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.e. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II BOGOR TINGKAT II BOGOR</p>											
<p>Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>											
<p>ttd. ttd.</p>											
<p><b>Drs. IMRONI ANWAR S.S.</b> NIP. 010033945</p>											
<p>Keamny</p>											
<p><b>Drs. H. DR. SOENARKO, M.P.</b> NIP. 010333945</p>											
<p><b>k) CATATAN MENGENAI PAJAK</b></p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							



**N O T A R I S**  
**BUDY BHUDIMAN, S.H;M.H**

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : C-616.HT/03.01-Th.1998 Tanggal : 26 November 1998

Jl. Raya Cibeber KM.17, Kaum Kaler Cibeber Cianjur

Telp. {0263} 334173, 0818893235

---

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
LUKMANUL HAKIM**

Nomor : 01.

Tanggal : 15-04-2016

**S A L I N A N**

AKTA PENDIRIAN  
TATARAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

LUNMANUL HAKIM

Nomor: 01.-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal lima belas April dua ribu enam belas (empat belas) pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia - bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, BUDY BHUDIMAN Sarjana Hukum,----- Magister Hukum, Notaris Kabupaten Cianjur di Cibeber, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini:-----

1. -Tuan Doktor ABDUL KARTIKA HAFIZM, Magister Sains,----- dilahirkan di Bogor pada enam Juli seribu Sembilan ratus enam puluh (06-07-1960), Warga Negara----- Indonesia, Dosen, bertempat-tinggal di Kota Bogor,-- Perumahan bukit Mekar Wangi Blok C.17 Nomor 36,----- Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 05, Kelurahan----- Mekarwangi, Kecamatan Tanah Jareal; --Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3271060607600002.-----
2. -Tuan NAMANG RAHMAT, Sarjana Teknik, dilahirkan di Bogor pada sebelas Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat (11-03-1974), Warga Negara----- Indonesia, wiraswana, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Karung Kunak Kawling 7, Rukun Tetangga 001,-- Rukun Warga 12, Desa Situ Uduk, Kecamatan ----- Cibungbulang; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----

Nomor Induk Kependidikan 3201161103740001.

-Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar nebagaimana termasuk dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama :  
"YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LUTNU  
MAKHMUD" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan") berkedudukan dan berkantor pusat di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol, Desa Sukamaju, Kampung Nyalindung Rukun Tetangga 12, Rukun warga 04.
2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAXSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :